

	News Title : Kemendag Beri Gambaran soal Kebijakan Ekspor CPO Lewat Bursa Berjangka	
	Media Name : detik.com	Journalist : Erika Dyah Fitriani
	Publish Date : 30 June 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Olvy Andrianita (Sekretaris Bappebti), Farid Amir (Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Ditjen Daglu Kemendag)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi Bisnis	Topic : Ekspor CPO

detikFinance > Berita Ekonomi Bisnis

Kemendag Beri Gambaran soal Kebijakan Ekspor CPO Lewat Bursa Berjangka



Jakarta - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali menggelar Konsultasi Publik Kebijakan Ekspor Minyak Kelapa Sawit (Crude Palm Oil/CPO) Melalui Bursa Berjangka di Indonesia, Senin (26/6). Sebelumnya, kegiatan serupa sempat digelar Senin (5/6) lalu yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan Zulkadri Hasan.

Kali ini, kegiatan dipimpin Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita mewakili Pih Kepala Bappebti, serta diikuti pemangku kepentingan sektor kelapa sawit, di antaranya pelaku usaha, asosiasi, dan perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

"Banyak masukan dan perhatian yang disampaikan pelaku usaha dalam kegiatan tersebut, sehingga kami kembali mengadakan konsultasi publik lanjutan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait rancangan kebijakan yang sedang disusun," jelas Pih Kepala Bappebti Iy Karim dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2023).

Baca juga:
Zulhas Kunci Keberhasilan Pengendalian Harga Dengan kurema Kolaborasi

Iy Karim berharap ekspor CPO melalui bursa berjangka dapat menciptakan bank data CPO yang akurat. Ini juga sejalan dengan arahan Undang-undang Nomor 50/1997 sebagaimana diamendemen menjadi Undang-undang Nomor 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Kebijakan tersebut mengesakan salah satu tujuan PBK adalah sarana pencapaian harga (price discovery) dan pembentukan harga acuan (price reference) yang transparan. Hal ini pun digagas oleh Menteri Perdagangan pada Rapat Kerja Bappebti dan Kementerian Perdagangan tahun 2023.

Lebih lanjut, Iy Karim menyebut bursa CPO yang ditunjuk pemerintah harus terpercaya, baik di pasar domestik maupun internasional. Bursa CPO juga harus mampu memberikan layanan yang optimal kepada pelaku usaha.

Baca juga:
Eropa Gengsi Sawit Bt, Luhut Ancam Alihkan Ekspor ke Afrika

Menurutnya, biaya transaksi CPO di bursa juga harus kompetitif atau minimal sama dengan biaya transaksi CPO yang dilakukan selama ini oleh pelaku usaha Indonesia di bursa Malaysia. Kebijakan ini diharapkan dapat dipertimbangkan dengan mempertimbangkan kontrak jangka panjang (long term contract) dan mudah dalam pelaksanaannya.

ia pun mengatakan butuh pelatihan dan sosialisasi terkait tata cara serta mekanisme ekspor melalui bursa berjangka kepada pelaku usaha.

Dalam kegiatan konsultasi publik ini, dilakukan juga sesi paparan yang dimoderatori Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Juan Permata Adoe. Sesi ini memaparkan konsep Rancangan Peraturan Bappebti tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisk untuk Ekspor CPO di Bursa Berjangka.

Ada juga paparan konsep Peraturan Tata Tertib (PTT) Bursa oleh Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita, serta paparan konsep Rancangan Peraturan dan Baku Proses Ekspor CPO melalui Bursa Berjangka oleh Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dijen Daglu) Farid Amir.

Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Dijen Daglu Farid Amir menerangkan ekspor melalui bursa berjangka komoditi hanya akan mengatur CPO dengan HS 15111000, tidak termasuk produk turunannya. Hal ini dipicu karena CPO tersebut volumenya tidak terlalu besar dan dirita tidak akan membentuk program untuk skala besar saat diimplementasikan.

"Selain itu, pihak pihak yang berhak melakukan ekspor adalah Eksporir Tertentu (ET) dan memiliki Hak Ekspor (HE) yang diperoleh dari pemenuhan atas kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) dan/atau dari pihak yang mengalihkan HE atas pemenuhan DMO," jelas Farid.

Baca juga:
Bertermu Dulies Korael, Zulhas Bahas Penguatan Kerja Sama Perdagangan

Farid menambahkan tidak ada perubahan yang signifikan dalam alur bisnis proses dari kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka. Namun, ada penambahan satu proses sebelum ekspor melakukan ekspor CPO, yaitu harus dilaksanakan di bursa berjangka untuk kemudian diterbitkan bukti pembelian CPO oleh bursa. Bukti pembelian ini adalah dokumen yang akan digunakan dalam proses ekspor Perizinan Ekspor (PE).

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menjabarkan Rancangan Peraturan Bappebti dan Rancangan Peraturan dan Tata Tertib Bursa. Menurutnya, Rancangan Peraturan Bappebti tentang Petunjuk Teknis Perdagangan Pasar Fisk untuk Ekspor CPO mengatur sejumlah hal, beberapa di antaranya tata kelola bursa CPO dan lembaga waliing CPO, persyaratan perizinan bursa CPO dan lembaga waliing CPO, tata cara perdagangan di bursa CPO, mekanisme pengawasan oleh Bappebti dan bursa CPO, serta mekanisme penyelesaian perselisihan dan force mayor.

Sedangkan Peraturan Tata Tertib (PTT) ekspor CPO melalui bursa berjangka berisi ketentuan lebih teknis yang mencakup persyaratan dan tata cara penerimaan peserta penyelenggara pembeli, fak dan kewajiban peserta penyelenggara pembeli, daya jaminan transaksi, mekanisme pengawasan, mekanisme penyerahan fisk CPO dan force mayor.

Baca juga:
Mendag Dorong UNIGEM Bt Manfaatkan Teknologi untuk Kembangkan Bisnis

"Dalam prosesnya, ketiga kebijakan/ketentuan teknis tersebut harus komprehensif dan sinergi, sehingga perlu mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan. Kebijakan ekspor CPO juga harus selaras dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan CPO dalam negeri, sehingga tidak membendkan pelaku usaha," papar Olvy.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Juan Permata Adoe menekankan kebijakan-kebijakan yang dibuat harus dapat diterima oleh pelaku usaha.

"Selain itu, diharapkan penghasilan devisa dari CPO ini dapat stabil. Sehingga, kebijakan ekspor CPO melalui bursa ini berdampak positif bagi industri," pungkas Juan.

(niraga)

kemendag bappebti minyak kelapa sawit cpo ekspor